

Perizinan pengoperasian wilayah kerja migas lepas pantai di Indonesia: tinjauan kasus penggunaan wilayah kerja Cimalaya dan Selat Madura = Operations permit of offshore oil and gas working area an over view: case on utilization of Cimalaya and Madura Strait working area

Asep Gunawan, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20432770&lokasi=lokal>

---

Abstrak

Penelitian ini membahas aspek-aspek hukum yang timbul dengan adanya perizinan pengoperasian Wilayah Kerja Migas khususnya wilayah kerja Lepas pantai dalam kaitannya dengan benturan peraturan perundang-undangan antara sektor Migas dengan Pelayaran. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa sebagian besar perizinan-perizinan baru (pelayaran sebagai salah satunya) yang ada yang bersinggungan dalam pengelolaan Wilayah Kerja Migas terutama wilayah kerja Lepas pantai menimbulkan ketidakpastian hukum dan usaha yang berakibat pada pembengkakan biaya operasi Badan Usaha Kontraktor Kontrak Kerja Sama Migas maupun Pelayaran itu sendiri. Di dalam penelitian ini di berikan tiga contoh kasus dimana mempunyai perspektif yuridis yang berbedabeda. Pada satu kasus mengakibatkan ketidakpastian usaha dalam sektor Migas, sementara kasus lain pada sektor Pelayaran. Harapannya ketiga contoh kasus ini setidaknya dapat menjadi sumber inspirasi hukum bagi seluruh Pemangku Kepentingan dalam kegiatan yang berhubungan dengan area lepas pantai, baik sektor Migas, sektor Pelayaran maupun sektor-sektor lain yang terkait seperti perikanan laut lepas dan sebagainya. Dengan penelitian ini paling tidak memberikan inspirasi untuk perlu segera merumuskan penyelesaian masalahmasalah terkait tumpang tindih peraturan perundang-undangan sehingga masingmasing sektor dapat memberikan sumbangsih terbaik kembali kepada bangsa, negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran seluruh rakyat Indonesia.

<hr>This study was discussing the legal aspects that arisen due to operations permit on Oil and Gas working area especially for Offshore working area in relating to the conflict between Oil and Gas Regulation and Shipping Regulation. This study is a normative juridical study. Result of this study stated that most of the permits (shipping as one of the example) which intersected with an Oil and Gas Working Area has creating a legal and business uncertainties which impacted on operational cost from both Oil and Gas business entities and Shipping itself. There are three example cases that were studied which has a differentiate juridical point of view. One case was creating a business uncertainty in Oil and Gas sector, while on the other cases in shipping sector. It is expected that those three example cases at least could made a legal source inspiration to all Stakeholders which involving activities related to offshore area, Oil and Gas, shipping as well as other sectors such us fishery etc. With this study at least would give an inspiration to urgently formulize a solution in relate to overlapping regulation cases hence each sector could gives the best contribution back to the Nations, the state and would be used for the welfare of the whole people of Indonesia.